

**EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN REKLAMASI PANTAI  
DI TELUK LAMPUNG**  
(Studi Dampak Sosial-Ekonomi Nelayan Kelurahan Sukaraja Pada Kasus  
Reklamasi Pantai Di Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras,  
Kota Bandar Lampung)

Fitri Wahyuni  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila  
Email: [fitriwahyuni151@yahoo.com](mailto:fitriwahyuni151@yahoo.com)

Meiliyana  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila  
Email: [meiliyana.1974@fisip.unila.ac.id](mailto:meiliyana.1974@fisip.unila.ac.id)

**ABSTRAK.** Kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung cukup menimbulkan beberapa masalah atau kurangnya kondisi sosial ekonomi rendering nelayan di sekitar area reklamasi. Setelah kebijakan reklamasi pantai dilaksanakan, memberi dampak pada nelayan tentang sulitnya menemukan ikan dan memenuhi kebutuhannya. Maka rumusan tersebut diperoleh dengan cara bagaimana dampak sosial ekonomi penangkapan ikan akibat adanya kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung khususnya Kelurahan Sukaraja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang dampak ekonomi sosial yang dirasakan sebagai salah satu nelayan yang timbul akibat adanya kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dampak kebijakan reklamasi pantai. Dalam mengevaluasi dampak kebijakan ini, peneliti menggunakan teori evaluasi dampak atau evaluasi metode evaluasi sumatif milik Rossi dan Freeman, lalu menggunakan hukum dan beberapa teori pendukung lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan reklamasi pantai belum menghasilkan dampak yang diinginkan. Hal ini disebabkan beberapa faktor. (1) Masalah yang terkait dengan kurangnya lahan publik di kota Bandar Lampung masih harus dipecahkan, (2) kurangnya partisipasi atau partisipasi masyarakat pesisir, (3) bagaimana pelaksanaannya tidak tepat, (4) Pemerintah Dari kota Bandar Lampung yang belum menerapkan pembangunan lingkungan, (5) Namun keberadaan penanganan Pemerintah Kota Bandar Lampung menerima masyarakat pesisir terkait dampak, (6) kejadian masyarakat pesisir harus dirugikan. Dan hanya menguntungkan pengembang. Selain itu, kebijakan reklamasi pantai menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat pesisir khususnya nelayan Kelurahan Sukaraja. Jadi Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu menerapkan pembangunan lingkungan, pengawasan dan koordinasi untuk mengatasi dampak dari masyarakat yang membutuhkan serta dalam proses kebijakan reklamasi pantai.

**Kata kunci:** Kebijakan, Evaluasi, Reklamasi Pesisir, Dampak

**ABSTRACT.** *The policy of coastal reclamation in the Teluk Lampung ample poses some problems or lack of socio-economic conditions of rendering of fishermen around the area of reclamation. After the policy of coastal reclamation implemented, have are gave an impact on the fishermen about being the difficulty*

*in finding fish and meet his needs. So the formula obtained by the issue of how socio-economic impacts of fishing due to the perceived policy of coastal reclamation in the Teluk Lampung, especially Kelurahan Sukaraja. The purpose of this research is to give an overview of the impact of the social economy is perceived as one of the fishermen the impact arising from the existence of a policy of coastal reclamation in the Teluk Lampung. This research was conducted to evaluate the impact of coastal reclamation policy. In evaluating the impact of this policy, researchers used the theory of impact evaluations or evaluation summative evaluation methods belonged to Rossi and Freeman, then use the law and some other supporting theory. Type of this research is descriptive research with qualitative approach. Conclusion of this research is the policy of coastal reclamation have yet to produce the desired impact. This is due to several factors. (1) Problems related to lack of public land in the town of Bandar Lampung has yet to be resolved, (2) the lack of participation or the participation of coastal communities, (3) how implementation is not appropriate, (4) the Government of the city of Bandar Lampung that have yet to implement environmentally development, (5) Yet the existence of the handling of the Government of the city of Bandar Lampung accepted impact-related coastal communities, (6) the incidence of coastal communities must feel aggrieved and only benefit the developer. In addition, the policy of reclaiming the beaches generate unwanted impacts for coastal communities in particular Kelurahan Sukaraja fisherman. So the Government of the city of Bandar Lampung need to apply environmentally development, oversight and coordination to deal with the impact of requiring community as well as in the process of coastal reclamation policy.*

**Keywords:** Policy, Evaluation, Coastal Reclamation, Impact.

## LATAR BELAKANG MASALAH

Provinsi Lampung memiliki posisi yang sangat strategis dan menguntungkan karena sebagian besar wilayah Lampung dikelilingi laut yaitu, laut Jawa dan Selat Sunda hingga Samudera Hindia, hal ini membuat Lampung sebagai salah satu jalur komunikasi lintas laut strategis. Dengan kondisi seperti ini, tentunya Lampung memiliki potensi alam yang melimpah dengan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi sumber penghasilan dan daya tarik tersendiri. Tidak dapat dipungkiri, dengan letak Provinsi Lampung yang strategis ini mengandung keuntungan dan juga kerawanan dalam mendominasi pembangunan, khususnya di Kota Bandar Lampung.

Demi pengembangan kota dan aktivitas perekonomian, sering kali

mengabaikan dan mengesampingkan segala dampak yang ditimbulkan, baik itu dampak lingkungan, ekonomi maupun sosial. Pemerintah yang hanya terfokus pada pertumbuhan dan pengembangan kota tanpa menganalisis dampak yang ditimbulkan, seringkali mengeluarkan kebijakan yang diduga merugikan bagi masyarakat, dan cenderung menguntungkan bagi sebagian pihak saja. Bahkan saat ini demi pengembangan kota, banyak pantai di Kota Bandar Lampung yang telah dilaksanakan Reklamasi pantai oleh pihak swasta (atas izin atau kebijaksanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung).

Sebenarnya aturan mengenai reklamasi telah ada dan dilegalkan, yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 pasal 34 juncto

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menjelaskan bahwa reklamasi memiliki arti kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Selain itu reklamasi pantai hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan ekonominya.

Dijelaskan pula dalam Peraturan Presiden nomor 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa dalam pengambilan sumber material reklamasi tidak boleh merusak kelestarian ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengakibatkan terjadinya erosi pantai dan mengganggu keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Namun pada kenyataannya proyek reklamasi ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dan cenderung tidak memperhatikan kondisi dan dampak yang tidak diharapkan yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat.

Sedangkan menurut Hasni, mengatakan bahwa reklamasi pantai merupakan suatu peralihan fungsi dari wilayah pantai menjadi sebuah wilayah daratan. Pengadaan reklamasi pantai pada umumnya dilakukan untuk menjadikan kawasan yang tidak bermanfaat menjadi kawasan yang mempunyai manfaat. Kawasan hasil

reklamasi biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pertanian, pemukiman, perindustrian, pertokoan atau bisnis dan obyek wisata. Selain itu kegiatan reklamasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan konservasi wilayah pantai. Kegiatan ini dilakukan apabila suatu wilayah tererosi atau terabrasi cukup parah sehingga perlu dikembalikan seperti kondisi semula, karena lahan tersebut mempunyai arti bagi wilayah dan Negara. Bagi daerah, pengadaan reklamasi pantai juga dapat memberikan suatu ruang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya dari tanah yang muncul sebagai hasil reklamasi pantai.<sup>16</sup>

Maka dari itu pemerintah mulai melegalkan adanya reklamasi di daerah-daerah yang dianggap dapat strategis untuk dilakukannya reklamasi pantai. Begitu pula dengan pemerintah Kota Bandar Lampung yang mulai memperbolehkan sejumlah perusahaan untuk melakukan reklamasi disepanjang Teluk Lampung. Faktanya bahwa saat ini dampak dari reklamasi ini mulai dirasakan oleh para nelayan yang mengaku pendapatan mereka dari menangkap ikan menurun akibat tercemarnya pantai, pantai menjadi kotor dengan sampah, menyebabkan banjir dan masyarakat juga mengeluhkan jalan-jalan sekitar pantai yang rusak akibat aktivitas truk-truk besar yang memuat material timbunan, tentunya semua itu akan merugikan masyarakat sekitar pesisir yang akan langsung merasakan dampak yang ditimbulkan dari proyek reklamasi pantai yang dikerjakan oleh

---

<sup>16</sup> Hasni. 2010. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH. Jakarta: Rajawali Pers. Hal :352

perusahaan.<sup>17</sup> Diantara perusahaan yang menimbun atau reklamasi pantai adalah PT. Teluk Wisata Lampung (TWL), PT. Sekar Kenaka Langeng (SKL), PT. Bukit Alam Surya (BAS), PT. Kurnia Agro Industri, PT. Bangun Lampung Semesta (BLS), PT. Noahtu Shipyard dan lain-lain. Kemudian dalam hal pelaksanaan reklamasi pantai di Teluk Lampung, PT. Teluk Wisata Lampung sebagai perusahaan yang cukup besar mendapat izin reklamasi pantai dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Lokasi pelaksanaan reklamasi ini terletak di Kelurahan Bumi Waras seluas 117 hektar. Kelurahan Bumi Waras menjadi salah satu pilihan lokasi reklamasi pantai yang cukup luas, mengingat di daerah tersebut cukup strategis karena banyak terdapat kawasan pertokoan, pergudangan dan industri. Selain itu PT. Teluk Wisata Lampung juga memilih Kelurahan Bumi Waras dan Gunung Kunyit sebagai tempat reklamasi karena disekitar proyek reklamasi tidak terdapat banyak pemukiman warga yang tinggal disekitarnya. Namun dalam hal ini Kelurahan Sukaraja merupakan kelurahan terdekat, dan berbatasan langsung dengan proyek reklamasi di Kelurahan Bumi Waras dengan PT. Teluk Wisata Lampung sebagai pelaksananya. sedangkan di Kelurahan Sukaraja juga cukup padat kawasan pemukiman warga yang tentunya dampak pelaksanaan reklamasi ini sangat dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Sukaraja. Dan di sekitar proyek reklamasi tersebut, masyarakat Kelurahan Sukaraja khususnya yang berprofesi sebagai nelayan mengeluhkan dampak dari reklamasi pantai, dalam hal ini

masyarakat yang ada di Kelurahan Sukaraja mayoritas berprofesi sebagai nelayan jika dibandingkan dengan Kelurahan Bumi Waras yang hanya sedikit sekali yang berprofesi sebagai nelayan.

Setelah adanya reklamasi ini, para nelayan sekitar yang mengantungkan hidupnya dari hasil laut, merasa dirugikan, baik secara materil maupun non materil. Nelayan sekitar menjadi mengeluhkan menurunnya hasil tangkap ikannya akibat tercemarnya laut, ini menyebabkan nelayan harus mencari lebih jauh lagi lautan yang belum tercemar untuk menangkap ikan. Selain dampak ekonomi nelayan yang merasa pendapatannya menurun, tentunya ini juga akan berdampak pada aspek sosial.

Dari hasil Prariset awal ditemukan beberapa fenomena seperti hasil tangkapan mulai menurun akibat dari reklamasi pantai dan jauhnya wilayah tangkapan menyebabkan pendapatan nelayan menurun, diduga berpengaruh langsung terhadap biaya pendidikan anak-anaknya. Penghasilan yang minim membuat para nelayan hanya mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya saja dan tidak mampu membiayai pendidikan anaknya lagi, dan masih banyak lagi masalah yang timbul baik itu, dampak terhadap lingkungan, ekonomi-sosial masyarakat sekitar tempat pelaksanaan proyek reklamasi pantai di Teluk Lampung.

Tidak hanya dampak yang dirasakan nelayan, namun pada kenyataannya, reklamasi ini juga telah menyimpang dari peraturan yang ada, material yang digunakan untuk melakukan reklamasi dikeruk dari wilayah bukit-bukit yang ada di Kota Bandar Lampung salah satunya yaitu bukit kunyit. Selain menimbulkan kerusakan pada

---

<sup>17</sup><http://lampost.co/berita/cemar-di-teluk-lampung>, diakses tanggal 28 Mei 2016).

ekosistem laut juga secara tidak langsung reklamasi juga merusak ekologi disekitar bukit yang dikeruk, sehingga dapat menimbulkan banjir dan kurangnya daerah resapan.<sup>18</sup>

Selain beberapa kerugian (dampak negatif) yang dikeluhkan oleh masyarakat (nelayan), menurut Olivianty Rellua (2013), ternyata reklamasi pantai juga memberikan keuntungan (dampak positif) dalam mengembangkan wilayah dan pemanfaatan lahan yang dianggap kurang produktif, praktek ini juga memberikan pilihan penyediaan lahan dalam wilayah/kota, pengembangan wisata pantai, berkembangnya pusat kegiatan bisnis, pengaturan sistem transportasi yang terpadu, meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir serta dapat memberikan kontribusi ekonomi untuk daerah dan masyarakat baik APBD, dan lapangan kerja baru. Memang beberapa keuntungan dari kebijakan reklamasi tersebut dapat dirasakan dalam jangka panjang.<sup>19</sup>

Menurut Rossi dan Freeman, mengatakan bahwa penilaian atas dampak adalah memperkirakan intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak.<sup>20</sup> Maka dari itu sangat penting untuk mempertimbangkan dampak yang akan dirasakan oleh nelayan sekitar proyek reklamasi tersebut. Karena tidak dapat dipungkiri, bahwa nelayan

sekitarlah yang akan merasakan dampaknya secara langsung yang tentunya berimbas pula pada perubahan ekonomi sosial nelayan.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Evaluasi Dampak Kebijakan reklamasi Pantai Di Teluk Lampung (Studi dampak sosial-ekonomi nelayan Kelurahan Sukaraja pada kasus reklamasi pantai di Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung)". Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau landasan berfikir bagi peneliti selanjutnya, yang kemudian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah untuk memperhatikan dampak dalam pelaksanaan reklamasi pantai bagi masyarakat.

Rumusan masalah penelitian ini, yaitu: "Bagaimana dampak sosial-ekonomi yang dirasakan nelayan akibat adanya Kebijakan Reklamasi Pantai di Teluk Lampung, khususnya di Kelurahan Sukaraja?"

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan terhadap Kebijakan Publik

Thomas R. Dye dalam Winarno, memberikan definisi kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan (whatever governments choose to do or not to do).<sup>21</sup> Sedangkan Dunn, "Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling

<sup>18</sup><http://lampung.Tribunnews.com/2016/04/10/reklamasi-pantai-di-bandarlampung-berpotensi-rusak-terumbu-karang>, diakses tanggal 28 Mei 2016).

<sup>19</sup> <http://ejournal.unsrat.ac.id/>

<sup>20</sup> Parsons, Wayne. 2011. *Public Policy: pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal: 604

<sup>21</sup> Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: teori, proses dan studi kasus*, Jakarta: PT Buku Seru. Hal: 20

bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”<sup>22</sup>. Menurut R.S. Parker dalam Wahab, juga telah berusaha menyajikan suatu daftar yang cukup lengkap mengenai berbagai definisi kebijakan publik. Salah satu definisi menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis.<sup>23</sup> Berdasarkan macam-macam definisi diatas maka yang dimaksud penulis dalam penelitian ini, kebijakan publik adalah segala atau semua usaha atau tindakan, keputusan, dan strategi yang diambil pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

## B. Tinjauan terhadap Evaluasi Kebijakan

Anderson dalam Winarno, mengemukakan evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak merupakan langkah terakhir dalam suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan yang fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada

tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan, dengan demikian evaluasi kebijakan bisa diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun dampak kebijakan.<sup>24</sup> Menurut Nugroho, menyatakan bahwa evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dan “kenyataan”.<sup>25</sup> Dari beberapa pengertian diatas, evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk menilai manfaat-manfaat atau dampak dari sebuah kebijakan publik yang telah diimplementasikan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik dalam menyelesaikan permasalahan publik.

## C. Tinjauan terhadap Evaluasi Dampak Kebijakan

Palumbo dalam Parson, mendefinisikan evaluasi sumatif atau evaluasi dampak digunakan untuk mengukur bagaimana sebuah kebijakan atau program telah memberikan dampak terhadap

<sup>22</sup> Dunn, William N. 2003 (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Pearson Education. Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hal:132

<sup>23</sup> Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis kebijakan Publik*. Malang: UMM Press. Hal:51

<sup>24</sup> Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: teori, proses dan studi kasus*, Jakarta: PT Buku Seru. Hal:229

<sup>25</sup> Nugroho, Riant. 2012. *Public policy, Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta. Elex Media Komputindo. Hal:471

masalah yang ditangani.<sup>26</sup> Sedangkan Menurut Rossi dan Freeman dalam Parson, penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal. Tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk memperkirakan “efek bersih” dari sebuah intervensi-yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga memengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang dievaluasi itu.<sup>27</sup> Dari beberapa pengertian diatas, evaluasi dampak kebijakan dapat diartikan sebagai akibat atau konsekuensi yang muncul dari pelaksanaan kebijakan dengan mengukur seberapa jauh kebijakan tersebut telah mencapai dampak yang diharapkan atau belum.

#### D. Tinjauan terhadap Reklamasi Pantai

Menurut Maskur, mengatakan bahwa kegiatan reklamasi pantai merupakan upaya teknologi yang dilakukan manusia untuk merubah suatu lingkungan alam menjadi lingkungan buatan, suatu tipologi ekosistem estuaria, mangrove dan terumbu karang menjadi suatu bentang alam daratan.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Parsons, Wayne. 2011. Public Policy: pengantar teori dan praktik analisis kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. HAL:552

<sup>27</sup> Parsons, Wayne. 2011. Public Policy: pengantar teori dan praktik analisis kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal:604

<sup>28</sup> <http://ejournal.uwks.ac.id>

Menurut Wisnu Suharto, menyatakan bahwa reklamasi adalah suatu pekerjaan atau usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau. Pada dasarnya reklamasi merupakan kegiatan merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan. Reklamasi dimaksudkan upaya merubah permukaan tanah yang rendah (biasanya tidak terpengaruh terhadap genangan air) menjadi lebih tinggi (biasanya tidak terpengaruh genangan air).<sup>29</sup> Konsep kebijakan reklamasi di Indonesia telah diatur dalam hukum positif Indonesia pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pada Pasal 34 ini juga dijelaskan bahwa reklamasi hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah dampak sosial-ekonomi nelayan:

1. Perubahan kondisi perekonomian nelayan sekitar proyek reklamasi pantai di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras( dari sisi daya beli dan taraf hidup nelayan)
2. Perubahan kondisi kesehatan para nelayan di Kelurahan

<sup>29</sup> <http://ejournal.awks.ac.id/>

Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras.

3. Perubahan kondisi pendidikan anak-anak nelayan di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras (dari sisi jenjang atau taraf pendidikan yang ditempuh).

Lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Wara, Kota Bandar Lampung, dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

Sebuah kebijakan dikatakan berhasil jika kebijakan yang dilaksanakan memberikan dampak yang diinginkan. Islamy (2007:115) dalam Jurnal Administrasi Publik, (Vol. 3, No.11, hal. 5) mengemukakan bahwa dampak adalah akibat-akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau program dan dampak dapat dilihat dari perubahan sikap dalam masyarakat. Selain itu menurut Wibawa (1994:30), di antara dampak-dampak yang diduga akan terjadi, ada dampak yang diharapkan dan tidak diharapkan. Begitu pula dengan kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung yang menyebabkan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Perubahan yang timbul sebagai wujud dampak dari kebijakan reklamasi ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat pesisir khususnya yang berprofesi sebagai nelayan. Karena reklamasi ini berkaitan erat dengan keberlanjutan ekosistem laut, yang menjadi tempat mata pencarian nelayan Sukaraja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## A. Perubahan Kondisi Ekonomi Nelayan

Menurut Parson (2008:552), dalam melakukan penilaian atas dampak di fase pasca-implementasi dari siklus kebijakan, evaluasi yang dimaksudkan untuk memperkirakan efek dari intervensi. Intervensi Kebijakan reklamasi Pantai di Teluk Lampung ini sangat berpengaruh pada aktivitas kehidupan nelayan di Sukaraja.

Menurut Rukman, dkk (2016:20), kasus reklamasi Teluk Lampung ini, tidak hanya memindahkan batuan dari gunung ke pantai, biota laut yang ada di daerah yang direklamasi, tetapi juga memindahkan masyarakat nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya dari mencari ikan dan kerang di sepanjang pantai. Lebih dari itu, proses reklamasi yang berlangsung juga memaksa masyarakat yang masih bertahan untuk berubag profesi yang telah mereka lakoni secara turun-temurun dari nelayan menjadi buruh pabrik. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, tidak banyak lagi nelayan Sukaraja yang bekerja sebagai nelayan, dan beralih menjadi mencari pekerjaan lain seperti, buruh pabrik, supir, kuli bangunan, dan lain-lain. Perubahan kondisi perekonomian nelayan yang ditopang dari sumber daya laut, dan alat-alat tradisional yang digunakan, membuat nelayan Sukaraja, semakin termarginalkan dengan adanya reklamasi pantai ini. Air laut yang keruh, dan lahan tangkapan yang semakin sempit ditambah lagi kondisi alam atau keadaan alam yang tidak menentu membuat nelayan kesulitan dalam mencari ikan yang berpengaruh pada menurunnya pendapatan nelayan Sukaraja.

Dalam diskusi publik telaah kritis reklamasi Teluk Lampung, yang peneliti ikuti didapatkan beberapa



fakta bahwa secara sosial reklamasi pantai dapat menyebabkan nelayan tradisional di Kelurahan Sukaraja menjadi tergusur dan terpinggirkan dari sumber-sumber kehidupannya di laut dikarenakan keadaan laut berbeda dari sebelumnya. Pengusuran ini dilakukan karena kawasan komersial yang akan dibangun seperti pengerjaan reklamasi pantai ini mensyaratkan pantai sekitarnya bersih dari berbagai fasilitas penangkapan ikan milik nelayan, hal ini dapat membuat nelayan kesulitan dalam mengakses laut. Dengan dibuatnya pulau-pulau buatan, secara tidak langsung akan menyulitkan nelayan mencari daerah tangkapan ikan. Lebih jauh lagi, profesi mereka akan terancam. Dengan adanya proyek reklamasi menjadikan mereka sangat sulit untuk mendapatkan ikan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya mereka sehari-hari berbagai cara harus dilakukan, salah satunya dengan beralih ke profesi yang lain.

Sebenarnya jika dikaji asal mula Kebijakan reklamasi pantai Teluk Lampung ini yang merupakan warisan kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung dari periode sebelumnya. Kebijakan reklamasi pantai telah dimulai lama sejak masa pemerintahan Walikota Era Zulkarnaen Subing, Nurdin Muhayat, Suharto, Edy Sutrisno, hingga pemerintahan Herman HN saat ini. berdasarkan penelusuran dokumen yang ada, kebijakan reklamasi pantai teluk lampung merupakan agenda dan kepentingan pengusaha yaitu PT Sekar Kanaka Langgeng, Bukit Alam Surya, PT Teluk Wisata Lampung, untuk pengembangan investasi dan pengelolaan kawasan pantai. Sedangkan Pemerintah Kota Bandar Lampung berkepentingan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Namun, dalam prakteknya kepentingan publik, dalam hal ini aktivitas ekonomi nelayan, kerusakan lingkungan dan hancurnya habitat laut menjadi persembahan dari kebijakan reklamasi tersebut. Inilah aspek kepentingan publik yang terabaikan dari kebijakan publik, nasib para nelayan dan masa depan generasi dihilangkan dari kebijakan reklamasi pantai Teluk Lampung.

Jika kita mengacu pada Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 juncto Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, terlihat bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan atau drainase. Namun dalam proses reklamasi pantai di Teluk Lampung ini belumlah mendatangkan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat pesisir, justru sebaliknya, proses reklamasi ini mendatangkan suatu perubahan kondisi perekonomian yang cukup signifikan pada kehidupan masyarakat pesisir khususnya nelayan sekitar proyek reklamasi.

Kelurahan Sukaraja yang memang mayoritas masyarakat disana berprofesi sebagai nelayan, banyak yang mengeluhkan perubahan kondisi perekonomian setelah adanya reklamasi pantai. Perubahan luasan laut akibat adanya penimbunan laut atau reklamasi ini tentunya berpengaruh pada daerah tangkapan ikan nelayan. Tidak hanya itu berdasarkan hasil observasi peneliti juga menemukan banyaknya timbunan sampah dipinggir pantai, selain itu reklamasi pantai yang ada di Gunung Kunyit juga membuat sampah menjadi terbawa aruh ke Kelurahan Sukaraja.

Teluk Lampung yang menjorok atau cekung, membuat sampah semakin banyak terbawa arus dan menumpuk disekitar tempat nelayan Sukaraja mencari ikan. Kelurahan Sukaraja yang masuk dalam Teluk Lampung juga menjadi tempat berkumpulnya sampah dikarenakan pula Kelurahan Sukaraja merupakan daerah yang diapit oleh dua proyek reklamasi yaitu di Kelurahan Way Lunik dan Gunung Kunyit. Semakin banyaknya sampah yang menyebabkan nelayan kesulitan dalam menarik payang ikan dan tidak jarang, payang yang nelayan gunakan itu tersangkut oleh sampah-sampah dipinggiran pantai.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lokasi penelitian, sampah yang ada di Kelurahan Sukaraja bukan hanya sampah limbah plastik, namun ada juga kayu-kayu, bambu, limbah kursi, dan lain-lain, yang menumpuk dipinggiran pantai. Sebenarnya sudah ada upaya pembersihan sampah disepanjang Teluk Lampung yang Pemerintah Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan masyarakat pesisir, namun upaya ini tidak dilakukan secara rutin dan kurangnya kesadaran masyarakat pesisir untuk membersihkan laut dan tidak membuang sampah kelaut. Inilah yang membuat proses reklamasi ini terus mendapat penolakan dari masyarakat pesisir Teluk Lampung mengingat banyaknya intervensi terhadap laut yang akan membuat masyarakat pesisir Teluk Lampung terganggu.

Menurut Wibawa (1994) dalam (<http://ejournal.unesa.ac.id>), dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat, pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Diantara dampak-dampak yang diduga akan terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, ada

dampak yang diharapkan dan ada yang tidak diharapkan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan bahwa ditemukan perubahan sikap masyarakat dalam hal kebijakan reklamasi ini masyarakat pesisir yang cenderung menolak untuk dilanjutkannya proyek reklamasi mengingat sudah muncul dampak sosial ekonomi yang nelayan Sukaraja rasakan karena sebuah ekosistem pantai yang sudah lama terbentuk dan tertata sebagaimana mestinya dapat hancur atau hilang akibat adanya reklamasi. Akibatnya adalah kerusakan wilayah pantai dan laut yang pada akhirnya akan berimbas pada ekonomi nelayan. Matinya biota laut dapat membuat ikan yang dulunya mempunyai sumber pangan menjadi lebih sedikit sehingga ikan tersebut akan melakukan migrasi ke daerah lain atau kearah laut yang lebih dalam, hal ini tentu saja akan mempengaruhi pendapatan para nelayan setempat. Bukan itu saja, sudah mejadi hukum alam, kegiatan mereklamasi pantai akan menyebabkan kenaikan masa air dan memicu terjadinya abrasi yang secara perlahan-lahan akan menggeser dan menenggelamkan kawasan sepanjang pantai bukan hanya di kawasan dimana reklamasi itu dilakukan, namun juga dikawasan lain yang dalam satu kesatuan ekosistem alamiahnya, saat ini di beberapa kawasan, air pasang yang naik bahkan telah memasuki kawasan pemukiman.

## **B. Perubahan Kondisi Pendidikan Anak Nelayan**

Perubahan perekonomian nelayan ternyata berpengaruh juga pada perubahan kondisi pendidikan anak nelayan di Kelurahan Sukaraja. Pasalnya perekonomian memiliki arti penting dalam pemenuhan biaya pendidikan dan tidak hanya itu

perekomian pula menjadi salah satu penyokong atau pondasi dalam menempuh jenjang pendidikan, dimana dalam hal ini pendapatan nelayan sangat dipengaruhi oleh hasil tangkapan ikan yang didapatkan saat melaut. Penyebab menurunnya hasil tangkapan ikan dan spesies ikan yang menurun juga menyebabkan nelayan harus semakin kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari begitu pula dalam memenuhi biaya pendidikan anaknya. Dalam hal ini, reklamasi pantai di Teluk Lampung sudah mengganggu ekosistem laut yang berdampak pada perkembangan biota laut baik itu flora maupun fauna yang ada di laut, hal ini yang nantinya menjadi salah satu penyebab nelayan kesulitan dalam mencari ikan dikarenakan terumbu karang yang selama ini dijadikan tempat berkembangbiaknya ikan menjadi terkubur atau ditimbun oleh pihak pengembang dengan dalih bertujuan untuk menata kawasan pesisir dan mengelolah kawasan yang kurang berguna menjadi lebih bermanfaat dan dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, nelayan Sukaraja mengaku kesulitan mencari ikan menyebabkan hasil tangkapan menurun dan pendapatan juga ikut menurun, akibatnya nelayan semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ditambah lagi untuk membiayai pendidikan anaknya. Sebelum adanya reklamasi, nelayan Sukaraja masih bisa memenuhi kebutuhannya bahkan bisa biayai pendidikan anak-anaknya, namun setelah adanya reklamasi dan juga diakibatkan dengan kondisi alam yang tidak menentu ini menyebabkan nelayan semakin kesulitan untuk membiayai pendidikan anaknya.

Walaupun pemerintah telah memberikan biaya sekolah gratis namun dalam hal transportasi, buku, seragam dan uang saku, nelayan Sukaraja mengaku keberatan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Maka dari itu kebanyakan dari anak nelayan di Sukaraja hanya menempuh jejang pendidikan setara Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja. Tidak banyak nelayan di Kelurahan Sukaraja yang mampu memberikan biaya pendidikan anaknya sampai ke bangku perkuliahan, mengingat semakin tingginya biaya pendidikan dan minimnya penghasilan atau pendapatan yang mereka dapatkan dari hasil mencari ikan. Selain berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti juga dibenarkan adanya dampak perubahan kondisi pendidikan yang dijelaskan oleh Rukman, dkk (2016:34), di Sukaraja dampak turunan selanjutnya terhadap kehidupan sosial nelayan semakin terasa dalam mencukupi kehidupan sehari-hari apalagi untuk membiayai pendidikan anak-anak. Sementara biaya pendidikan dirasakan sangat berat apalagi kalau sekolah jauh dari tempat tinggal. Fenomena yang ada, pendidikan anak-anak nelayan paling banyak hanya berpendidikan sekolah dasar, karena untuk menyekolahkan anak ketempat yang lebih jauh tidak memiliki biaya yang cukup.

### **C. Perubahan Kondisi Kesehatan**

Selain pengaruh terhadap perubahan kondisi perekonomian nelayan, ternyata reklamasi juga berpengaruh pada perubahan kondisi kesehatan yang diakibatkan dari reklamasi. Dalam proses pengerjaan reklamasi ini juga menimbulkan perubahan kondisi kesehatan

masyarakat pesisir Teluk Lampung karena berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di Kelurahan Sukaraja, masyarakat disana mengeluhkan dampak kesehatan yang mereka alami akibat adanya proyek reklamasi ini mulai dari penurunan kualitas udara karena adanya mobilisasi alat berat dan material, pekerjaan tanah, dan pembangunan fasilitas umum (debu dan gas kendaraan bermotor yang mengangkut bahan material reklamasi). Peningkatan kebisingan, di karenakan pada tahap pengerjaan reklamasi ada kegiatan mobilisasi alat berat dan material, pekerja tanah, dan sumber bising terutama bersumber dari lalu-lalang kendaraan pengangkut material uruk saat melakukan kegiatan pengangkutan dan pelaksanaan reklamasi pantai.

Peningkatan volume sampah dan limbah juga menjadi salah satu dampak negatif yang disebabkan dari adanya pengerjaan reklamasi pantai di Teluk Lampung, yang menyebabkan sampah menjadi terpusat dan tertumpah di Teluk Lampung, selain itu air laut juga menjadi keruh dan nelayan semakin sulit untuk menyandarkan kapal akibat tumpukan sampah dipinggiran pantai. Akibat semakin meningkatnya volume sampah menyebabkan daerah sekitar reklamasi menjadi beresiko terkena banjir, begitu pula dengan Kelurahan Sukaraja yang harus mengalami banjir semenjak adanya reklamasi di Teluk Lampung, banjir disertai dengan sampah yang sempat terjadi dan masuk kerumah-rumah warga menurut penuturan masyarakat Sukaraja.

Selain akibat sampah, sistem drainase yang kurang diperhatikan pihak pengembang juga menyebabkan daerah sekitar tempat reklamasi juga menjadi memiliki tingkat air yang lebih

tinggi dan abrasi pantai. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat kelurahan Sukaraja, mereka sempat terjangkit penyakit seperti gatal, demam, dan penyakit kulit lainnya yang disebabkan oleh adanya banjir. Menurut Rukman, dkk (2016:32), dampak turunan terhadap kesehatan khususnya jenis penyakit muntaber, hal ini diduga karena lingkungan yang semakin kumuh, tidak sehat sehingga berdampak terhadap munculnya penyakit ini.

Tidak hanya itu, masyarakat pesisir Teluk Lampung yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan juga mengeluhkan hasil tangkapan menjadi menurun yang berpengaruh langsung pada pendapatan yang menurun pula. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan istri nelayan yang mengaku kesulitan untuk memenuhi asupan gizi keluarganya akibat pendapatan atau hasil tangkapan suaminya menurun. Tentunya ini berpengaruh pada kesehatan karena pemenuhan asupan gizi keluarga nelayan menjadi tidak tercukupi dengan baik.

Selain beberapa dampak yang dipaparkan diatas, terdapat pula dampak lainnya, yang akan timbul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan reklamasi pantai ini diantaranya dapat mengurangi aksesibilitas ruang publik, ketidakberlanjutan fungsi ruang publik, terciptanya pola penataan ruang publik yang tidak memberikan keleluasaan akses bagi masyarakat pesisir Teluk Lampung.

Selain itu proyek reklamasi ini selamanya akan mengakibatkan ketimpangan struktural antara negara, korporasi, dan rakyat. Karena bagaimanapun juga Pemerintah yang melakukan reklamasi akan menggunakan kekuasaannya untuk

mengesampingkan mata pencarian sebagai nelayan tradisional dan kondisi masyarakat pesisir Teluk Lampung, dengan lebih mengedepankan kepentingan korporasi atau swasta tanpa mempertimbangkan dan mengikutsertakan masyarakat pesisir dalam perumusan kebijakan Reklamasi Pantai ini yang berakibat pada dampak negatif terhadap lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir khususnya yang berprofesi sebagai nelayan.

Ketimpangan struktur pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya pemiskinan struktural, pelanggaran HAM, dan pelanggaran hukum. Pemiskinan struktural terjadi ketika nelayan tradisional tidak dapat melaut dan mencari ikan karena aksesnya ditutup yang berakibat nelayan tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Jika proyek reklamasi terbukti menyulitkan nelayan mencari nafkah maka proyek tersebut nyata melanggar HAM. Dalam hak atas hidup itu sendiri, ada hak untuk meningkatkan taraf hidup dan hidup aman, tenteram, dan damai.

Jadi dalam pelaksanaan proyek reklamasi pantai ini belum mendatangkan dampak yang diharapkan bagi masyarakat. Dan cenderung menimbulkan dampak negatif yang diterima atau dirasakan langsung kepada masyarakat khususnya nelayan di Kelurahan Sukaraja yang berbatasan langsung dan berada dekat dengan proyek reklamasi di Teluk Lampung. Dampak yang timbul dari kebijakan reklamasi pantai berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi nelayan yang berdampak pula pada pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari.

1. Perubahan kondisi laut yang semakin sempit dan rusaknya

ekosistem laut menyebabkan nelayan menjadi kesulitan mencari ikan dan menyebabkan hasil tangkapan ikan dan pendapatan nelayan menjadi menurun.

2. Perubahan kondisi perekonomian nelayan yang menurun secara langsung juga mempengaruhi kondisi pendidikan anak nelayan. Pendapatan nelayan dari hasil tangkapan yang menurun, membuat nelayan menjadi tidak mampu membiayai pendidikan anaknya.
3. Kebijakan reklamasi pantai juga menyebabkan dampak yang mengganggu kesehatan, seperti debu, kebisingan, menumpuknya sampah dipinggir pantai, air menjadi keruh dan banjir yang menimbulkan penyakit diantaranya, gatal, demam, muntaber dan lain-lain. Selain akibat menurunnya pendapatan nelayan juga berpengaruh pada pemenuhan gizi dari keluarga nelayan itu yang tidak tercukupi dengan baik.

## KESIMPULAN

## SARAN

1. Perlunya partisipasi masyarakat dalam kebijakan reklamasi pantai di Teluk Lampung mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian.
2. Dibutuhkannya koordinasi lebih lanjut antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pihak pengembang untuk menangani dampak negatif yang muncul dari adanya kebijakan ini dan pengawasan yang berkelanjutan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam proses pelaksanaan proyek reklamasi pantai.
3. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga perlu untuk mulai menerapkan pembangunan berwawasan lingkungan

4. Perlunya Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat pesisir khususnya nelayan atas kerugian yang diterima.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul Wahab, Solichin. 2008. Analisis kebijakan Publik. Malang: UMM Press.

Dunn, William N. 2003 (1994). Public Policy Analysis: An Introduction, New Jersey: Pearson Education. Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Hasni. 2010. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH. Jakarta: Rajawali Pers.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

Islamy, M. Irfan. 1986. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bina Angkasa.

Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nugroho, Riant. 2012. Public policy, Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta. Elex Media Komputindo.

Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, aplikasi dan implementasinya dalam

pelaksanaan otonomi daerah). cv Mandar Maju.

Parsons, Wayne. 2011. Public Policy: pengantar teori dan praktik analisis kebijakan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rukman, Ali dkk, 2016. Tinjauan Kritis Reklamasi Teluk Lampung. Bandar Lampung: Pustaka Labrak

Soemarwoto, Otto. Analisis Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Suharno. 2013. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta. Penerbit Ombak.

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: teori, proses dan studi kasus, Jakarta: PT Buku Seru.

Wibawa, Samodra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

### SKRIPSI dan JURNAL

Choirul Huda, Moch. 2013. Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup. Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei. dalam <http://ejournal.uwks.ac.id/myfile/s/201308321915161512/1.pdf>, diakses tanggal 28 mei 2016

Noviananda Putri, Dwita dan Indah Brawanti. Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) (studi tentang program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Dusun Wedani Desa Wedani Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik) dalam <http://ejournal.unesa.ac.id/article/21100/42/article.pdf>

Ratna Sari, Octavia. 2015. Evaluasi Dampak Program KB bagi Keluarga

Prasejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera (KS-1) di Kota Bandar Lampung. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

<http://m.republika.c.id/berita/nasional/daerah/16/04/24/o65a2t280-walhi-tolak-reklamasi-teluk-lampung>, diakses tanggal 28 Mei 2016

Wulandari. 2013. Dampak Pembangunan Jalan Tol Kanci-Pejagan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani. Proposal Penelitian. Fakultas Ekologi manusia. Institut Pertanian Bogor. dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31418/4/chapter%20II.pdf>, diakses tanggal 29 mei 2016

<http://lampung.tribunnews.com/2016/04/10/reklamasi-pantai-di-bandar-lampung-berpotensi-rusak-terumbu-karang>, diakses tanggal 28 Mei 2016

<http://rmol.co/read/2016/07/20/253751/Kejagung-Kirim-Tim-Usut-Reklamasi-Teluk-Lampung>, diakses tanggal 11 agustus 2016

## UNDANG-UNDANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor.40/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai

## SUMBER LAINNYA

<http://lampost.co/berita/cemar-di-teluk-lampung>, diakses tanggal 28 Mei 2016